

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2024**

**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**Komplek Perkantoran Jl. Sukapura II
Kabupaten Tasikmalaya Telp./Fax : (0265) 333156
Website : dinsosppkbp3a.tasikmalayakab.go.id
Email : dinsosppkbp3a@tasikmalayakab.go.id**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021- 2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sasaran strategis dan sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2024 serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Melalui analisis dan evaluasi yang dilakukan dalam Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas kinerja Dinas pada tahun-tahun mendatang.

Singaparna, Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL PPKB P3A
KABUPATEN TASIKMALAYA

OPAN SOPIAN, S.Pd, M.Si, M.Pd.

Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19671028 199103 1 008



DAFTAR ISI

- KATA PENGANTAR.....	ii
- DAFTAR ISI	iii
- BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	5
1.1.1 Kedudukan	5
1.1.2 Tugas dan Fungsi.....	5
1.2. STRUKTUR ORGANISASI	7
- Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, PPKB, P3A KABUPATEN TASIKMALAYA.....	7
1.3. ASPEK KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA	7
1.3.1.Aspek Kepegawaian	7
- Tabel 1.1 Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenis Kelamin pada Tahun 2024 .	8
- Tabel 1.2 Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan pada Tahun 2024.....	8
- Tabel 1.3 Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang pada Tahun 2024	9
1.3.2. Aspek Sarana Prasarana	9
- Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Utama Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.....	9
1.4. ISU AKTUAL (STRATEGIC ISSUE).....	11
- Tabel 1.5 Identifikasi Isu Strategis.....	11
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN	14
- BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1. PERENCANAAN STRATEGIS.....	16
2.1.1. Rencana Strategis Dinsos PPKB P3A Tahun 2021–2026	16
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	17
- Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial PPKB P3A Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	17
- Tabel 2.2 Program dan Alokasi Anggaran Dinas Sosial PPKB P3A Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	18
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	22
- Tabel 3.1 Hasil Pencapaian Kinerja Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	23
- BAB IV PENUTUP	60
4.1. Kesimpulan	60
4.2. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah	60
- LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN TIM PENYUSUN LKIP TAHUN 2024 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TASIKMALAYA	68

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah selaku entitas akuntabilitas kinerja SKPD berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja tahunan kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja Instansi Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan jelas tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini berpedoman pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk mengukur pencapaian target kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja yang telah dicapai dalam 1 (satu) tahun.

Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya atas penggunaan anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dengan Kepala Daerah selama kurun waktu tahun pelaporan.

Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah di masa yang akan datang. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat

menjadi sarana informasi publik serta sebagai sarana evaluasi internal Dinas.

1.1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat Dinas Sosial PPKB P3A) Kabupaten Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.1.1 Kedudukan

Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.2 Tugas dan Fungsi

Kedudukan, susunan organisasi beserta tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya diatur melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah khususnya pada Bagian Kesembilan Pasal 33 sampai dengan Pasal 36.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

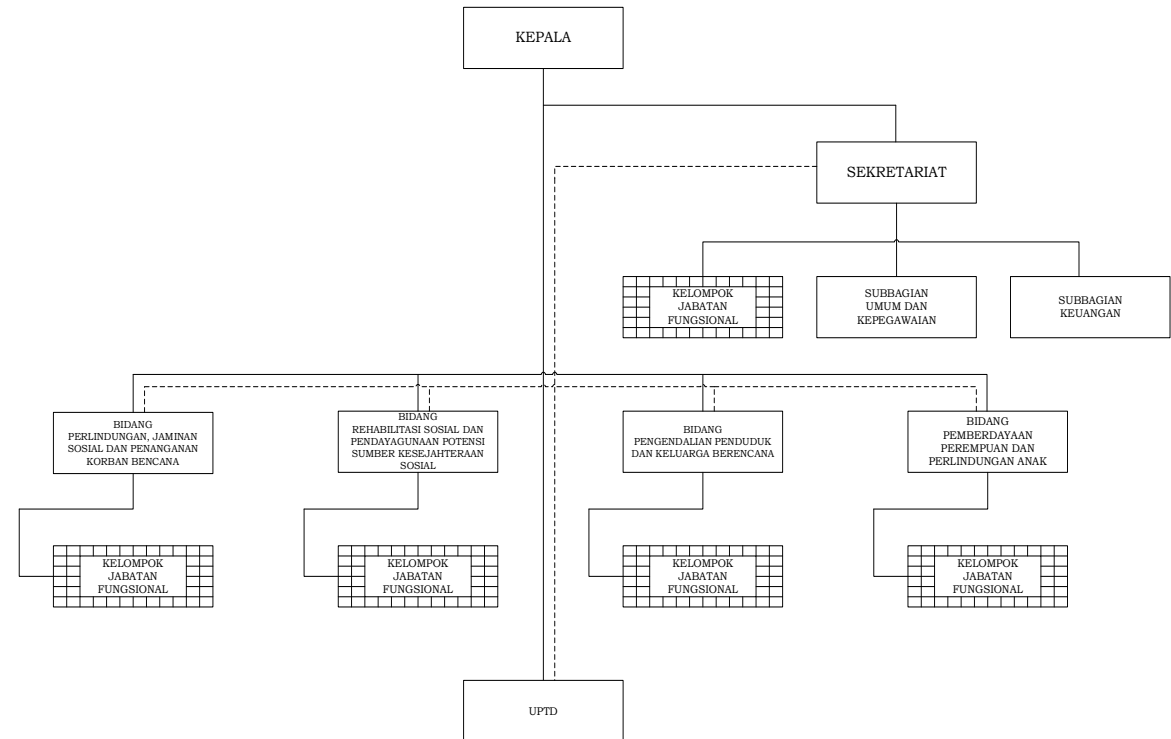
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan organisasi Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, PPKB, P3A
KABUPATEN TASIKMALAYA



1.3. ASPEK KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA

1.3.1. Aspek Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi disamping keuangan, material maupun metode. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh 38 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Komposisi sumber daya aparatur Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan jenis kelamin, jenjang pendidikan serta berdasarkan pangkat dan golongannya disajikan pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Dinas Sosial PPKB P3A
Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenis Kelamin
pada Tahun 2024

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Kepala Dinas	1	0	1
2	Sekretariat	4	5	9
3	Bidang Linjamsos	4	4	8
4	Bidang Rehabsos	4	3	7
5	Bidang PPKB	4	2	6
6	Bidang PPPA	2	2	4
7	UPTD PPA	2	1	3
TOTAL		21	17	38

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, diolah.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Dinas Sosial PPKB P3A
Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan pada
Tahun 2024

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	TINGKAT PENDIDIKAN							
			S3	S2	S1	D3	D2	D1	SMA	SMP
1	Kepala Dinas	1		1						
2	Sekretariat	9		2	6				1	
3	Bidang Linjamsos	8		1	6	1				
4	Bidang Rehabsos	7		1	6					
5	Bidang PPKB	6		2	2				2	
6	Bidang PPPA	4		2	1	1				
7	UPTD PPA	3		1	2					
TOTAL		38	0	10	23	2	0	0	3	0

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, diolah.

Tabel 1.3
Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Dinas Sosial PPKB P3A
Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Pangkat, Golongan dan
Ruang pada Tahun 2024

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	PANGKAT, GOLONGAN DAN RUANG										
			GOLONGAN IV			GOLONGAN III			GOLONGAN II			GOLONGAN IX	
			c	b	a	d	c	b	a	d	c		b
1	Kepala Dinas	1	1										
2	Sekretariat	9		1	1	4	1	1				1	
3	Bidang Linjamsos	8			1	1	3				1		2
4	Bidang Rehabsos	7			1	1		2	1				2
5	Bidang PPKB	6				2	2		1		1		
6	Bidang PPPA	4			1	1	2						
7	UPTD PPA	3			1	1	1						
TOTAL		38	1	1	5	10	9	3	2	0	2	1	4

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, diolah.

1.3.2. Aspek Sarana Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh sarana dan prasarana mobilitas dan operasional kantor sebagai penunjang kinerja aparatur yang secara umum dikelompokkan pada tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin utama, jaringan dan irigasi serta aset tetap lainnya.

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Utama Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah/ Volume
1	Tanah	
	- Tanah Kantor Dinas	1957 m2
	- Tanah Shelter/UPT PPPA	400 m2
	- Tanah Negara Milik Adat C No 2666 Persil No 162 Milik Prov Desa Pakemitan Kec Cikatomas	371 m2
2	Gedung dan Bangunan	
	- Gedung Kantor Dinas	1957 m2
	- Gedung Shelter/UPT PPPA	60 m2

No	Uraian	Jumlah/ Volume
	Gedung Balai Penyuluhan KB Kec Manonjaya, Kec Taraju, Kec Cikatomas, Kec Karangnunggal, Kec Ciawi dan Kec Singaparna	300 m2
3	Peralatan dan Mesin Utama	
	- Meja Kerja Eselon II	1 unit
	- Kursi Kerja Eselon II	1 unit
	- Kursi Kerja Eselon III	4 unit
	- Meja Biro	24 unit
	- Meja ½ Biro	13 unit
	- Meja Rapat	8 unit
	- Lemari	20 unit
	- Filing Kabinet	13 unit
	- Kursi Putar	41 unit
	- Kursi Sice/Sofa	3 unit
	- Kursi Kayu	4 unit
	- Kursi Rapat	1 unit
	- Smart TV	2 unit
	- TV	9 unit
	- AC	12 unit
	- Laptop / Note book	44/16 unit
	- Komputer	43 unit
	- Printer	61 unit
	- Komputer Server	2 unit
	- Mesin Penghancur Kertas	5 unit
	- Kendaraan Roda 6	- unit
	- Kendaraan Roda 4	13 unit
	- Kendaraan Roda 3	1 unit
	- Kendaraan Roda 2	101 unit
	- Alat Kedokteran dan KB	15 unit
4	Jaringan dan Irigasi	
	- Jaringan Internet	1 unit
5	Aset Tetap Lainnya	
	- Tenda Pengungsi	
	- Dapur Umum Bencana	

Sumber : Data Aset/Modal Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, diolah.

1.4. ISU AKTUAL (STRATEGIC ISSUE)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya signifikan bagi daerah. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Untuk menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu strategis perlu terlebih dahulu diidentifikasi isu-isu global, nasional, regional dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Identifikasi isu-isu strategis berdasarkan urusan pembangunan yang diselenggarakan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 1.5
Identifikasi Isu Strategis

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
I	Urusan Sosial		
1	Inter nasional <i>Indikator Tujuan Pembangunan Berke-lanjutan</i>	<p>Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasar dan inklusivitasnya</p> <p>Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKH</p> <p>Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN</p> <p>Pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial korban bencana sosial</p>	Adanya upaya seluruh pemangku kepentingan yang terintegrasi dalam penyelenggaraan Pronangkis
2	Nasional	<p>Penurunan angka kemiskinan melalui bantuan sosial bersyarat</p> <p>Penguatan dan pengembangan Puskesmas</p>	<p>Adanya pembenahan DTKS</p> <p>Adanya kuota tambahan penerimaan bantuan sosial bersyarat</p> <p>Adanya perhatian dari pemangku kepentingan di daerah dalam</p>

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
			penguatan dan pengembangan Puskesmas
		Peningkatan Profesionalisme SDM penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial	Bertambahnya jumlah relawan sosial, pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang memiliki sertifikasi keahlian
3	Daerah	Penguatan pengelolaan DTKS sebagai dasar acuan penerima bantuan sosial pemerintah	Pemadanan DTKS dengan data NIK pada Disdukcapil serta verifikasi dan validasi data penerima bantuan secara berkala
		Penguatan pendampingan, konsolidasi, koordinasi, monitoring dan pengawasan penyaluran bantuan sosial bersyarat	Peningkatan koordinasi dan konsolidasi Tikor Kabupaten dan Tikor Kecamatan dalam monitoring dan pengawasan penyaluran bantuan sosial bersyarat
		Pemenuhan SPM urusan bidang sosial secara menyeluruh	Pemenuhan SPM dilaksanakan sesuai dengan regulasi tentang tata cara pemenuhan SPM
		Peningkatan peran dan konsolidasi UPCKP, SLRT dan Puskesmas dalam pelaksanaan layanan data dan pengaduan, layanan rujukan serta pemberian akses ke pendidikan dan kesehatan dasar	Adanya sinergitas UPCKP, SLRT dan Puskesmas dalam verifikasi lapangan layanan data dan pengaduan, layanan rujukan serta pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
II	Urusan PPPA		
1	Inter nasional <i>Indikator Tujuan Pembangunan Berke-lanjutan</i>	Jumlah kebijakan responsif gender yang mendukung pemberdayaan perempuan	Adanya perhatian dari pemangku kepentingan terkait penyusunan kebijakan responsif gender
		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Adanya penguatan dan peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan secara komprehensif

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Meningkatnya pemberdayaan kaukus politik bagi perempuan
2	Nasional	Peningkatan kualitas PUG dalam pembangunan	Meningkatnya capaian IPG dan IDG serta diraihnya anugerah APE
3	Daerah	Peningkatan skor capaian KLA	Adanya penguatan dan pengembangan Desa Layak Anak dan Forum Anak Daerah serta pelaksanaan Self Assesmen capaian KLA
		Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha ekonomi keluarga	Adanya peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok PEKKA dan peningkatan pemberdayaan perempuan melalui P2WKAA
III	Urusan PPKB		
1	Inter nasional <i>Indikator Tujuan Pembangunan Berke-lanjutan</i>	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan alat kontrasepsi
		Angka prevelensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	
		Pengetahuan dan pemahaman PUS tentang metode kontrasepsi modern	
		Unmeet Need KB (kebutuhan KB yang tidak terpenuhi)	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam ber-KB
		Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	
2	Nasional	Peningkatan penyelengga-raan Program Bangga Kencana	Meningkatnya jumlah daerah yang telah menyusun dokumen GDPK
			Penguatan dan pengembangan Kampung KB dan Rumah Dataku
			Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam ber-KB
			Meningkatnya ketahanan

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
			dan kesejahteraan keluarga
3	Daerah	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam ber-KB dan penurunan angka stunting	Meningkatnya akseptor KB Meningkatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam ber-KB Meningkatnya advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) melalui petugas lini lapangan

Setelah isu strategis dapat diidentifikasi, selanjutnya dilakukan pembobotan terhadap isu-isu strategis tersebut. Pembobotan dilakukan melalui FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis dan menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dalam rangka mendukung visi dan misi daerah. Dari hasil FGD, diperoleh penentuan skor untuk kriteria isu strategis sebagai berikut.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Isntansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya beserta penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsinya, permasalahan utama (strategic issue) serta sistematika penyusunan Laporan Kinerja;

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan mengenai ringkasan/ikhtisar perjanjian pada tahun pelaporan;

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya pada tahun pelaporan dengan analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta realisasi anggaran yang digunakan;

BAB IV : PENUTUP

Merupakan rangkuman dan kesimpulan umum atas capaian kinerja beserta permasalahan dan solusi;

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

2.1.1. Rencana Strategis Dinsos PPKB P3A Tahun 2021–2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan dari mulai strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 9 Desember 2020. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu:

“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional;

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional dan global.

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya Dinas Sosial PPKB P3A secara umum di susun Rencana Strategis untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembagian daerah yang berisi program program prioritas.

Tujuan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
- 2) Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- 3) Meningkatkan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial PPKB P3A disusun dengan memperhatikan Dokumen Revisi Rencana Strategis Dinas Sosial PPKB P3A Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. Selanjutnya, dari 7 (Tujuh) sasaran dan 7 (Tujuh) indikator sasaran yang tertulis dalam Dokumen Revisi Rencana Strategis Dinas Sosial PPKB P3A Tahun 2021-2026. Tujuh indikator sasaran tersebut selanjutnya akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka mendukung pencapaian IKU Kabupaten yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Sosial PPKB P3A.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial PPKB P3A Perubahan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial	67,17 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	Persentase korban bencana alam dan sosial yang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	100 %
3.	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan glandangan pengemis di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan glandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100 %
4.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	4,24%
5.	Meningkatnya kualitas pemberdayaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,32 Poin
6.	Meningkatnya kepesertaan KB	Rasio akseptor KB	71,89 %
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	63 Poin

Setelah mengalami perubahan sebagai upaya mendukung pencapaian target kinerja sasaran, Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan 12 (Dua Belas) program dengan total anggaran sebesar **Rp. 42.295.826.100** (Empat puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah). Rincian program dan besaran anggaran per program tahun 2024 disajikan dalam Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Program dan Alokasi Anggaran Dinas Sosial PPKB P3A
Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No	Program	Aggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.788.947.977	
2	Program Pemberdayaan Sosial	718.000.000	
3	Program Rehabilitasi Sosial	2.584.100.000	
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	6.630.628.123	
5	Program Penanganan Bencana	2.849.000.000	
6	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	803.000.000	
7	Program Perlindungan Perempuan	180.000.000	
8	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	875.000.000	

No	Program	Aggaran (Rp)	Keterangan
9	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	953.620.000	
10	Program Pengendalian Penduduk	487.000.000	
11	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	9.660.530.000	
12	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	9.766.000.000	
	Jumlah	42.295.826.100	

Besaran anggaran per urusan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Sosial;

Total alokasi anggaran Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya untuk penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial sebesar Rp. 12.781.728.123,00 (Dua belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh tiga rupiah) atau sebesar 30,22% dari total anggaran Dinas, yang terdiri dari 4 (empat) program dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Pemberdayaan Sosial, dengan anggaran sebesar Rp. 718.000.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta rupiah);
- b. Program Rehabilitasi Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.584.100.000,00 (Dua milyar lima ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.630.628.123,00 (Enam milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh tiga rupiah); dan
- d. Program Penanganan Bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.849.000.000,00 (Dua milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah).

2. Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana;

Total alokasi anggaran Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya untuk Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana adalah sebesar Rp. 19.913.530.000,00 (Sembilan belas milyar sembilan ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) atau dengan persentase sebesar 47,08% dari total anggaran Dinas, yang terdiri dari 3 (tiga) program dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Pengendalian Penduduk, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 487.000.000,00 (Empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.660.530.000,00 (Sembilan milyar enam ratus enam puluh lima ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.766.000.000,00 (Sembilan milyar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah).

3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Total alokasi anggaran Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya untuk penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebesar Rp. 2.811.620.000,00 (Dua milyar delapan ratus sebelas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) atau dengan persentase sebesar 6,65% dari total anggaran Dinas, yang terdiri dari 4 (empat) program dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 803.000.000,00 (Delapan ratus tiga juta rupiah);
- b. Program Perlindungan Perempuan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 180.000.000,00 (Seratus delapan puluh juta rupiah);
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 875.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
- d. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 953.620.000,00 (Sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

4. Urusan Penunjang;

Total alokasi anggaran Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya untuk penyelenggaraan urusan penunjang adalah sebesar Rp. 6.788.947.977,00 (Enam milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau dengan persentase sebesar 16,05%, yang terdiri dari 1 (satu) program, yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.788.947.977,00 (Enam milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Selanjutnya Perjanjian Kinerja diikuti oleh seluruh pejabat struktural Eselon III dan IV hingga pelaksana secara berjenjang dan secara periodik seluruh unit kerja menyampaikan perkembangan rencana aksinya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah secara periodik.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Tabel 3.1
Hasil Pencapaian Kinerja Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian IKU 2024	Hambatan	Upaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial	%	67,17	81,60	121,48	1. Kendala penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat di wilayah terluar, terpencil, dan tertinggal (3T); 2. Keterbatasan anggaran serta kompetensi SDM; 3. Informasi terkait jenis serta mekanisme bantuan yang dapat diakses oleh masyarakat masih sangat minim, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tahu; 4. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data utama penerima bantuan sosial belum sepenuhnya valid.	1. Pengurangan beban masyarakat miskin; 2. Peningkatan pendapatan; 3. Program Keluarga Harapan (PKH).
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi	%	100	100	100,00	1. Gudang penyimpanan terlalu kecil sehingga barang di tumpuk dengan	1. Menjalankan program penanganan korban bencana yang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian IKU 2024	Hambatan	Upaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota					<p>1. pelayanan tanggap darurat;</p> <p>2. Minimnya jumlah paket sandang untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial;</p> <p>3. Minimnya anggaran untuk penanggulangan bencana sehingga tidak bisa maksimal dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat.</p> <p>4. Pengajuan laporan bencana masih sangat minim di ketahui dan pahami oleh masyarakat sehingga keterlambatan dalam pelaporan.</p>	<p>tidak hanya terbatas pada pemenuhan makanan dan sandang;</p> <p>2. Meningkatkan pelatihan kesiapsiagaan bencana sehingga Masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana;</p> <p>3. memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai tanggap darurat bencana;</p> <p>4. Pengajuan Anggaran melalui TAPD serta kebutuhan yang di butuhkan oleh korban bencana ketika paska bencana, maupaun belum terealisasi di tahun sebelumnya;</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian IKU 2024	Hambatan	Upaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								5. Merealisasikan pengajuan kebutuhan yang Optimal
3	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100,00	1. Data PPKS yang menjadi sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum sepenuhnya bisa menjadi acuan dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar; 2. Pemenuhan kebutuhan dasar baru permakanaan dan alat bantu saja; 3. SDM untuk pemenuhan kebutuhan dasar belum maksimal; 4. Desa belum maksimal menginput Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk PPKS yang menjadi SPM	1. Pengambilan data SPM dari DTKS untuk pemenuhan kebutuhan dasar; 2. Pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan tanpa anggaran meskipun tidak maksimal; 3. Pemberdayaan Pendamping Sosial; 4. Pemberdayaan Pendamping Sosial untuk koordinasi dengan Operator Desa.
4	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	%	4,24	4,24	100,00	1. Kurangnya SDM untuk menangani PPKS; 2. Tidak berfungsinya shelter dikarenakan Lokasi yang terlalu jauh	1. Pemberdayaan Pendamping Sosial; 2. PPKS terlantar langsung di rujuk tanpa dimasukan ke

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian IKU 2024	Hambatan	Upaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							(Lokasi Shelter di Manonjaya); 3. Tidak adanya anggaran untuk penanganan PPKS diluar SPM.	shelter; 3. Pelaksanaan kegiatan terbatas.
5	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	64,32	*61,52	95,65	1. Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam parlemen;2. Masih rendahnya keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional dalam pengambilan keputusan;3. Sumbangan pendapatan perempuan masih rendah.	1. Meningkatkan jumlah perempuan dalam kegiatan ekonomi atau bidang ketenagakerjaan;2. Meningkatkan jumlah perempuan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan;3. Menargetkan keterwakilan 30 % perempuan di parlemen.
6	Meningkatnya Kepesertaan KB	Rasio Akseptor KB	%	71,89	69,63	96,86	Tidak semua tempat pelayanan KB melaporkan melalui Aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) terutama yang menggunakan alat dan obat kontrasepsi mandiri.	Memperbanyak Pelayanan KB Momentum di setiap Faskes Kecamatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian IKU 2024	Hambatan	Upaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	63	70,66	112,16	Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah.	Sosialisasi sekaligus bimbingan teknis terhadap penerapan Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk lebih meningkatkan kualitas dan memperkuat implementasi Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

**Realisasi Tahun Sebelumnya*

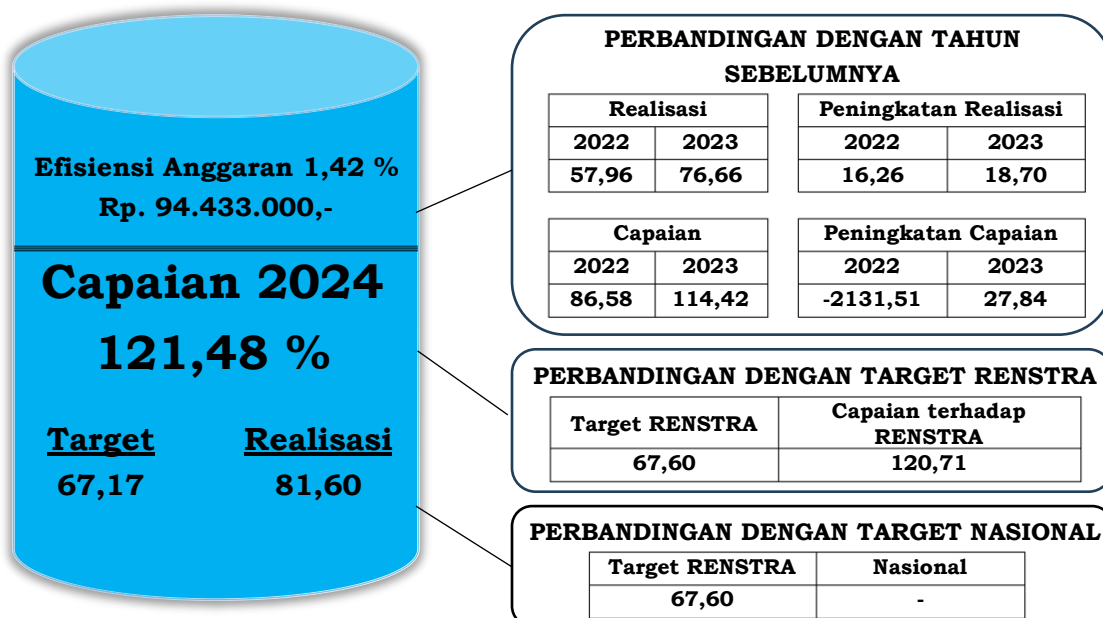
Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa dari 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya, sebagian telah dapat menyamai target kinerja dengan persentase sebesar 42,86%, yang melampaui target sebesar 42,86%, yang mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 28,57% dan sisanya 14,29%.

Uraian terhadap pengukuran kinerja capaian sasaran urusan sosial, urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. **Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin** **Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial**

Masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial adalah fakir miskin, lanjut usia terlantar di luar panti, anak terlantar di luar panti, penyandang disabilitas terlantar di luar panti, gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti.

Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2024 capaian kinerjanya adalah sebesar 121,48%. Apabila dibandingkan realisasi tahun 2023 yaitu 76,66% terdapat kenaikan 4,94% pada tahun 2024 menjadi 81,60%. Angka ini telah melebihi target pada tahun 2024 yaitu 67,17%, Capaian kinerja dari indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari indikator kinerja yang diukur, capaian kinerjanya melebihi target yang direncanakan.

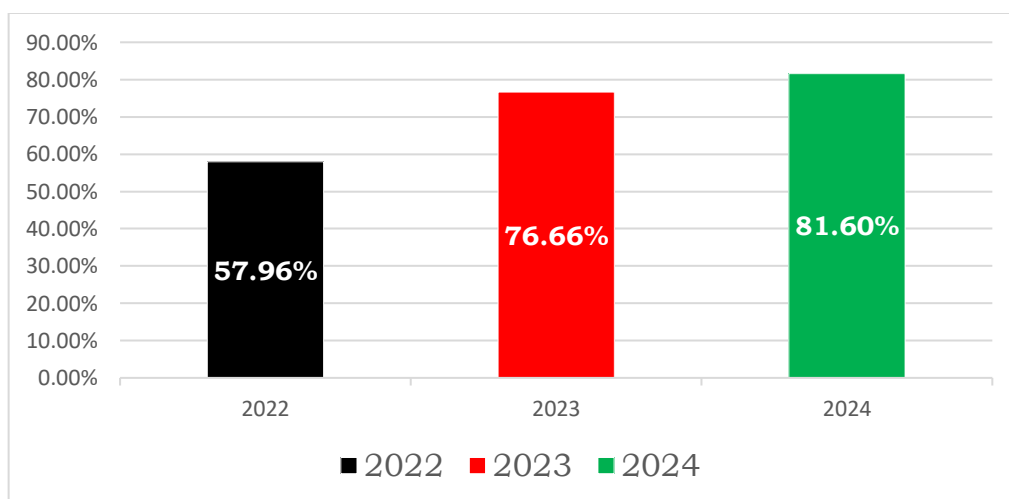


Pada Aspek Realisasi Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial mengalami peningkatan 4,94% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 76,66% meningkat pada tahun 2024 sebesar 81,60%. Sedangkan pada aspek

kinerja, capaian pada tahun 2024 ini mengalami peningkatan 7,06% dari pencapaian target tahun sebelumnya yaitu capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 114,42% menjadi 121,48% pada tahun 2024.

Dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian kinerja Tahun 2024 terealisasi sebesar 81,60% dari target Renstra sebesar 67,60%. Capaian tahun 2024 telah melampaui target sebesar 14%. sehingga capaian realisasi Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial telah melampaui capaian Renstra yang telah ditetapkan. Berdasarkan tren data, capaian realisasi Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami Peningkatan di tahun 2022 realisasi sebesar 57,96%, tahun 2023 mencapai 76,66% dan pada tahun 2024 sebesar 81,60%. Hal ini merupakan wujud peningkatan perhatian dari para pemangku kepentingan dalam meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Tren Peningkatan realisasi Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial



Maka, formulasi/perhitungan capaian kinerja dari indikator kinerja dimaksud adalah sebagai berikut :

$$\left(\frac{\text{jumlah PPKS yang memperoleh sosial pemenuhan kebutuhan dasar dalam 1 (satu)tahun}}{\text{Jumlah PPKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar}} \right) \times 100$$

$$\left(\frac{1.120.414 \text{ orang}}{1.372.997 \text{ orang}} \right) \times 100 = 81,60\%$$

Rincian target, capaian kinerja dan persentase capaian kinerja untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

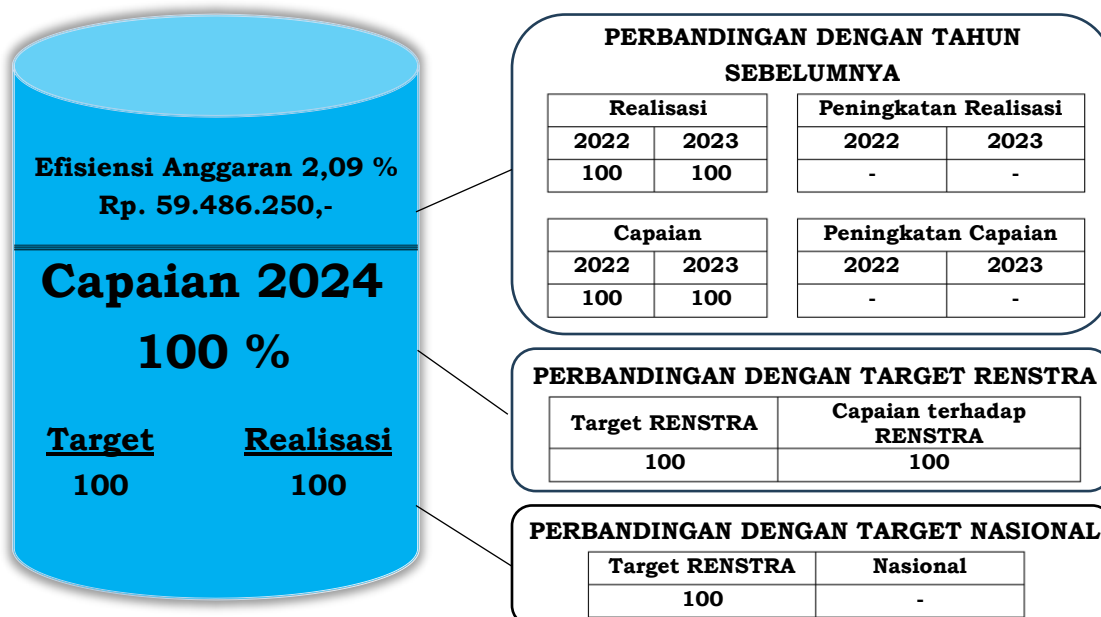
Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
fakir miskin	Orang	1.372.997	1.120.414	81,60
Lansia	Orang	4.650	4.650	100
anak	Orang	2.300	2.300	100
Disabilitas	Orang	1.296	1.296	100
Gepeng	Orang	50	50	100
Jumlah		1.381.293	1.128.710	81,71

Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial bertujuan untuk Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial. Faktor keberhasilan tercapainya target Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial melalui kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial. Adapun efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 1,42% atau setara dengan Rp. 94.433.000,- Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.630.628.123,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.536.195.123,-

2. **Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota** **Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota**

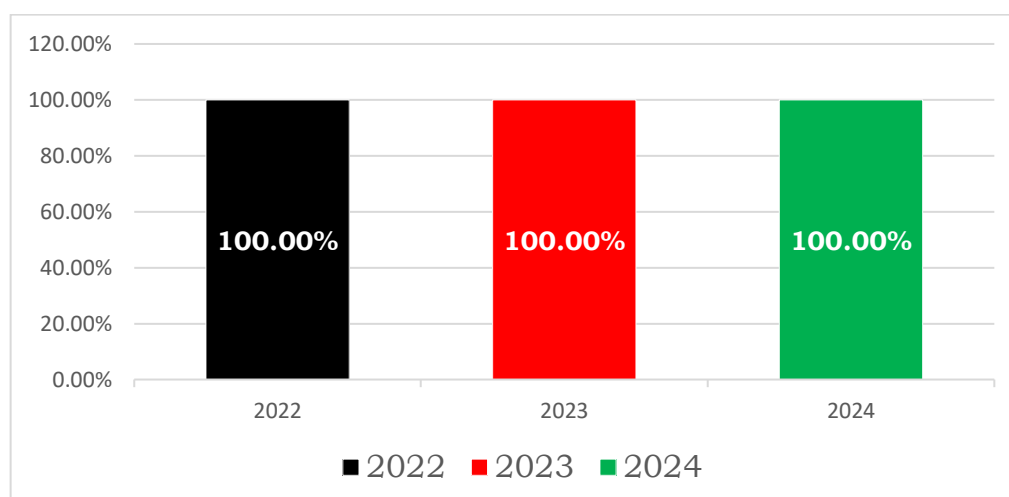
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2024 capaian kinerjanya adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan realisasi tahun 2023 yaitu 100% dapat menyamai pada tahun 2024 sebesar 100%. Angka ini dapat mencapai target pada tahun 2024 yaitu 100%, Capaian kinerja dari indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari indikator kinerja yang diukur, capaian kinerjanya dapat mencapai target yang direncanakan.



Pada Aspek Realisasi dan aspek kinerja Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota dapat menyamai dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 100%, pada tahun 2024 sebesar 100%.

Dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian kinerja Tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dari target Renstra sebesar 100%. Capaian tahun 2024 dapat mencapai target. Berdasarkan tren data, capaian realisasi Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat mencapai target yaitu sebesar 100%. Tercapainya target kinerja pada tahun 2024 dikarenakan telah terpenuhinya penyediaan paket bantuan bagi korban bencana sesuai dengan estimasi kebutuhan yang telah diperhitungkan.

Tren Peningkatan realisasi Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota



Maka, formulasi/perhitungan capaian kinerja dari indikator kinerja dimaksud adalah sebagai berikut :

$$\left(\frac{\text{Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun}}{\text{jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun}} \right) \times 100$$

$$\left(\frac{8.230 \text{ jiwa}}{8.230 \text{ jiwa}} \right) \times 100 = 100,00\%$$

Berdasarkan Berita Acara/Laporan Kejadian Bencana yang disampaikan oleh Kecamatan beserta unsur Muspika Kecamatan, jumlah laporan kejadian bencana pada tahun 2024 sebanyak 250 kejadian bencana alam dan bencana sosial, dengan total jumlah korban sebanyak 2.441 KK/8.230 jiwa yang seluruhnya telah menerima bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat.

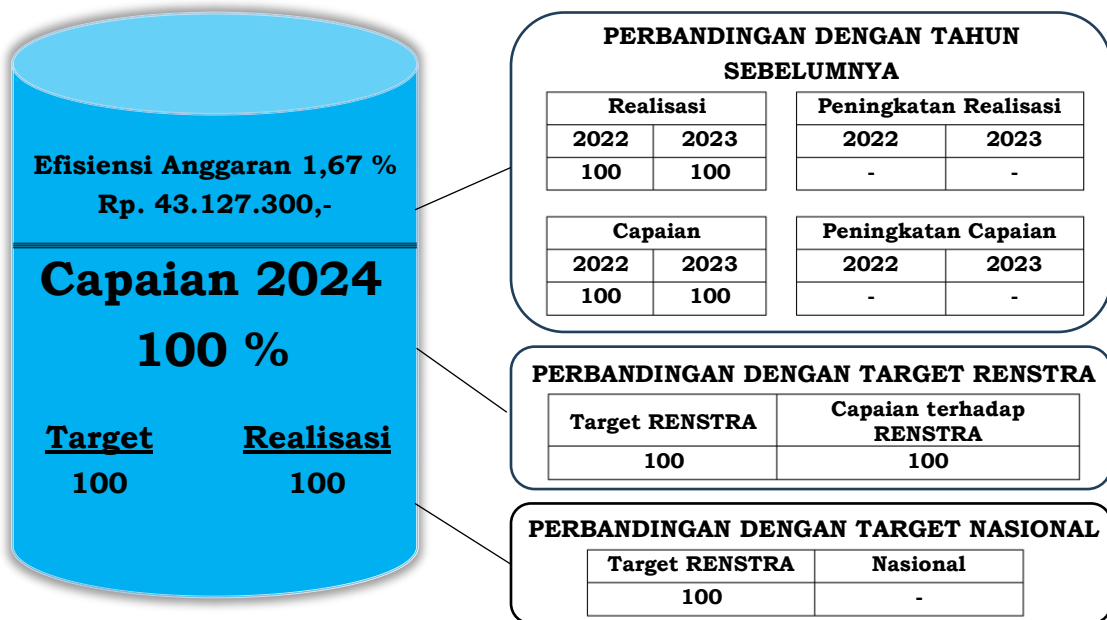
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial. Faktor keberhasilan tercapainya target Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota; dan
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu Program Penanganan Bencana. Adapun efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 2,09% atau setara dengan Rp. 59.486.250,- Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.849.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.789.513.750,-.

3. **Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti** **Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar**

Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2024 capaian kinerjanya adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan realisasi tahun 2023 yaitu 100% dapat menyamai pada tahun 2024 sebesar 100%. Angka ini dapat mencapai target pada tahun 2024 yaitu 100%, Capaian kinerja dari indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari indikator kinerja yang diukur, capaian kinerjanya dapat mencapai target yang direncanakan.

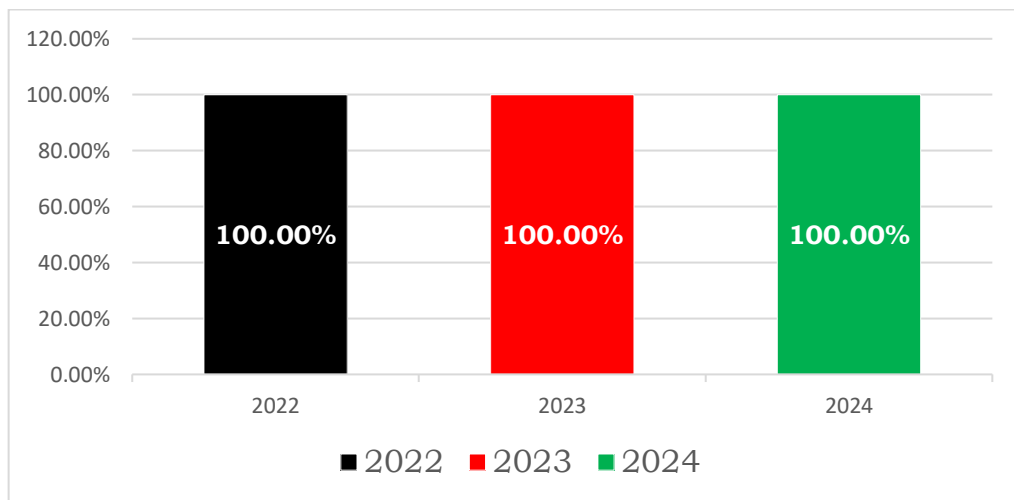


Pada Aspek Realisasi dan aspek kinerja Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dapat menyamai dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 100%, pada tahun 2024 sebesar 100%.

Dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian kinerja Tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dari target Renstra sebesar 100%. Capaian tahun 2024 dapat mencapai target. Berdasarkan tren data, capaian realisasi Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti

yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat mencapai target yaitu sebesar 100%.

Tren Peningkatan realisasi Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar



Maka, formulasi/perhitungan capaian kinerja dari indikator kinerja dimaksud adalah sebagai berikut :

$$\left(\frac{\text{jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar dalam 1 (satu) tahun}}{\text{jumlah PPKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar}} \right) \times 100$$

$$\left(\frac{8.296 \text{ jiwa}}{8.296 \text{ jiwa}} \right) \times 100 = 100,00\%$$

Rincian target, capaian kinerja dan persentase capaian kinerja untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Lansia	Orang	4.650	4.650	100
anak	Orang	2.300	2.300	100
Disabilitas	Orang	1.296	1.296	100
Gepeng	Orang	50	50	100
Jumlah		8.296	8.296	100

Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bertujuan untuk Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial. Faktor keberhasilan tercapainya target Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak

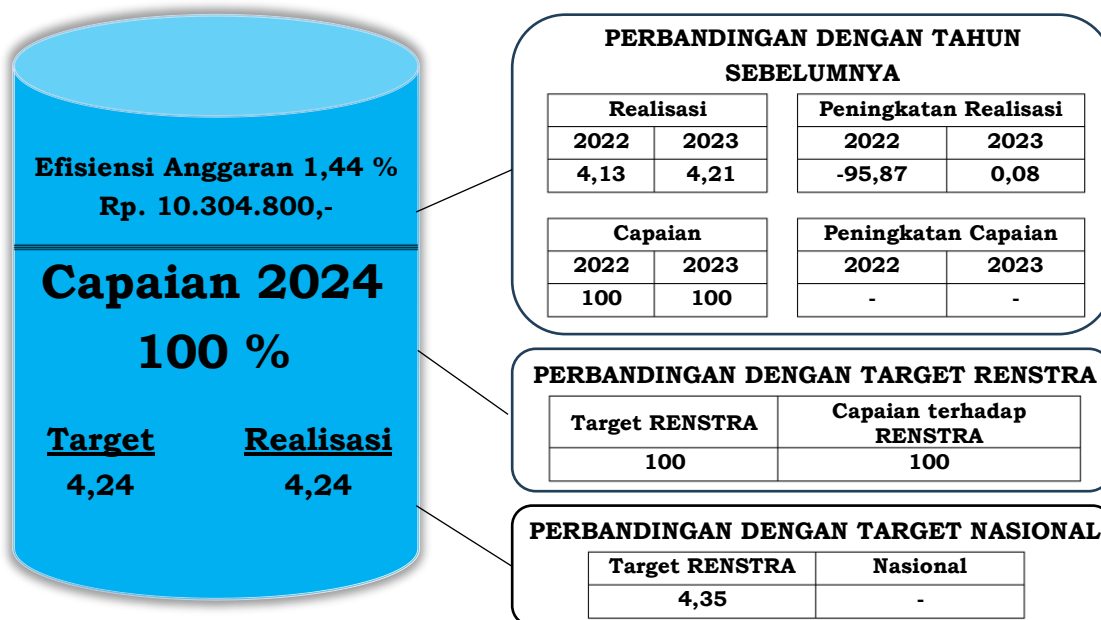
terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar melalui kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu Program Rehabilitasi Sosial. Adapun efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 1,67% atau setara dengan Rp. 43.127.300,- Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.584.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.540.972.700,-.

4. **Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS** **Persentase PPKS yang tertangani**

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang dimaksud disini merupakan kelompok PPKS diluar fakir miskin, penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis serta korban bencana yang telah diuraikan dalam indikator kinerja sebelumnya. Persentasi PPKS yang tertangani pada tahun 2024 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditentukan dan menyamai capaian pada tahun 2023.

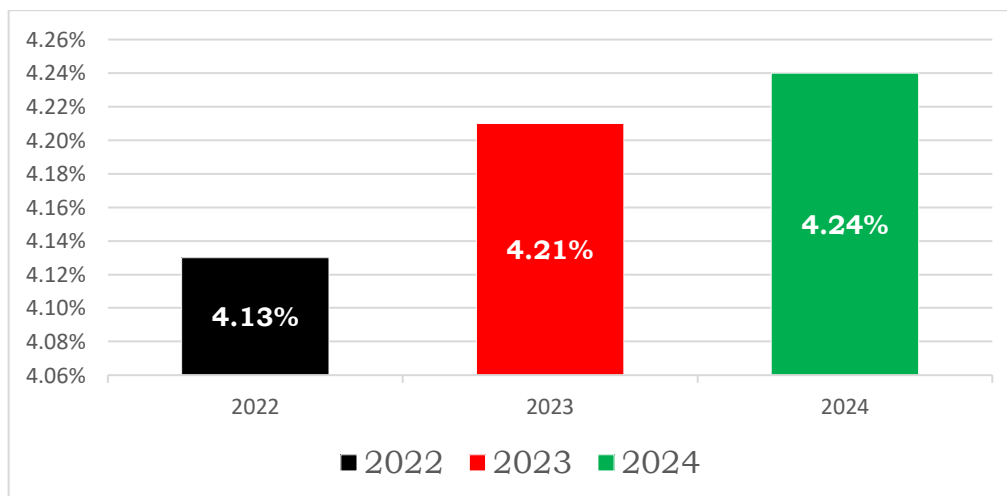
Persentase PPKS yang tertangani pada tahun 2024 capaian kinerjanya adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan realisasi tahun 2023 yaitu 4,21% terdapat kenaikan 0,03% pada tahun 2024 menjadi 4,24%. Angka ini telah mencapai target pada tahun 2024 yaitu 4,24%, Capaian kinerja dari indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari indikator kinerja yang diukur, capaian kinerjanya mencapai target yang direncanakan.



Pada Aspek Realisasi Persentase PPKS yang tertangani mengalami peningkatan 0,03% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 4,21% meningkat pada tahun 2024 sebesar 4,24%. Sedangkan pada aspek kinerja, capaian pada tahun 2024 ini sama dengan dari pencapaian target tahun sebelumnya yaitu capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100% dan pada tahun 2024 pun sebesar 100%.

Dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian kinerja Tahun 2024 terealisasi sebesar 4,24% dari target Renstra sebesar 4,35%. Capaian tahun 2024 belum mencapai target. capaian realisasi Persentase PPKS yang tertangani kurang 0,11% dari Target Renstra yang telah ditetapkan. Berdasarkan tren data, capaian realisasi Persentase PPKS yang tertangani tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami Peningkatan di tahun 2022 realisasi sebesar 4,13%, tahun 2023 mencapai 4,21% dan pada tahun 2024 sebesar 4,24%.

Tren Peningkatan realisasi Persentase PPKS yang tertangani



Maka, formulasi/perhitungan capaian kinerja dari indikator kinerja dimaksud adalah sebagai berikut :

$$\left(\frac{\text{jumlah PPKS lainnya yang tertangani}}{\text{jumlah PPKS yang memerlukan penanganan dalam 1 tahun}} \right) \times 100$$

$$\left(\frac{108 \text{ kasus}}{108 \text{ kasus}} \right) \times 100 = 100\%$$

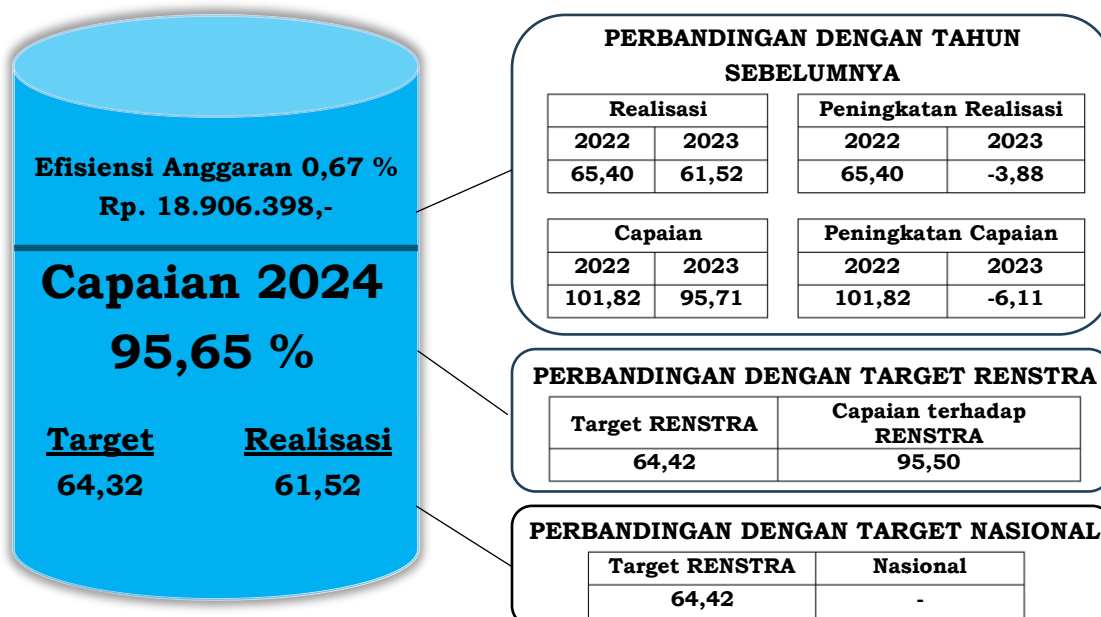
Kasus-kasus PPKS tersebut telah dapat ditangani oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan didukung oleh tenaga relawan dan kelembagaan kesejahteraan sosial yang diantaranya adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Penggerak Sosial Masyarakat (PSM), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Panti Sosial dan relawan sosial lainnya.

Persentase PPKS yang tertangani bertujuan untuk Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial. Faktor keberhasilan tercapainya target Persentase PPKS yang tertangani melalui kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu Program Pemberdayaan Sosial. Adapun efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 1,44% atau setara dengan Rp. 10.304.800,- Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 718.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 707.695.200,-.

5. **Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak** **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

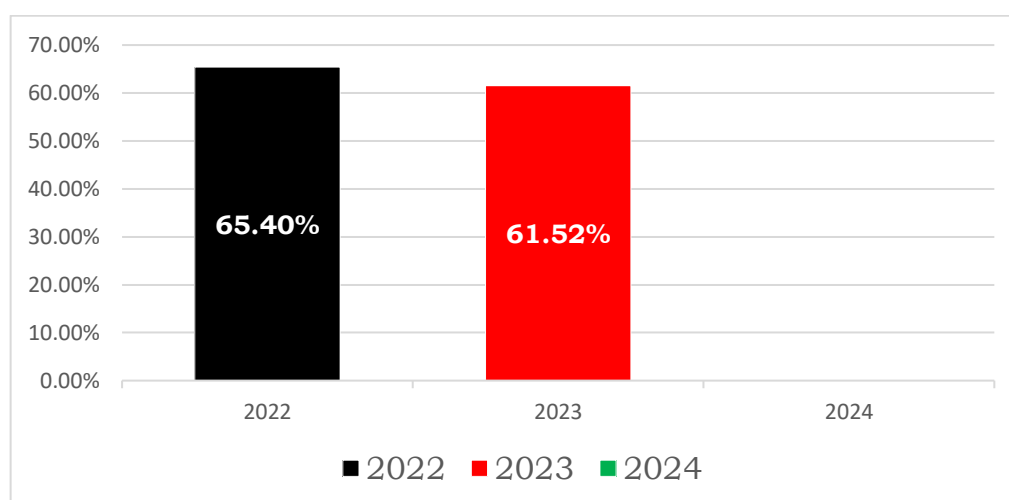
Indek Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2024 sementara capaian kinerjanya adalah sebesar 95,65%. Karena realisasi tahun 2024 belum keluar nilainya dari BPS Pusat, jadi Dinsos PPKB P3A menggunakan realisasi tahun 2023 sebesar 61,52%. Angka ini belum bisa mencapai target pada tahun 2024 sebesar 64,32%, Capaian kinerja dari indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari indikator kinerja yang diukur, capaian kinerjanya belum bisa mencapai target yang direncanakan.



Pada Aspek Realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) belum diketahui apakah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena nilai belum keluar dari BPS Pusat. Sedangkan pada aspek kinerja, capaian pada tahun 2024 ini mengalami penurunan sebesar 0,06% dari pencapaian target tahun sebelumnya yaitu capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 95,71% menjadi 95,65% pada tahun 2024.

Dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian kinerja Tahun 2024 terealisasi sebesar 61,52% dari target Renstra sebesar 64,42%. Capaian tahun 2024 belum bisa mencapai target. sehingga capaian realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) belum bisa mencapai capaian Renstra yang telah ditetapkan. Berdasarkan tren data, capaian realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami Penurunan di tahun 2022 realisasi sebesar 65,40%, tahun 2023 mencapai 61,52% tetapi pada tahun 2024 belum ada.

Tren Peningkatan realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)



Indek Pemberdayaan Gender (IDG) bertujuan untuk Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Faktor keberhasilan tercapainya target Indek Pemberdayaan Gender (IDG) melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
3. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
4. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
5. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
6. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
8. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
9. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota; dan
10. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu:

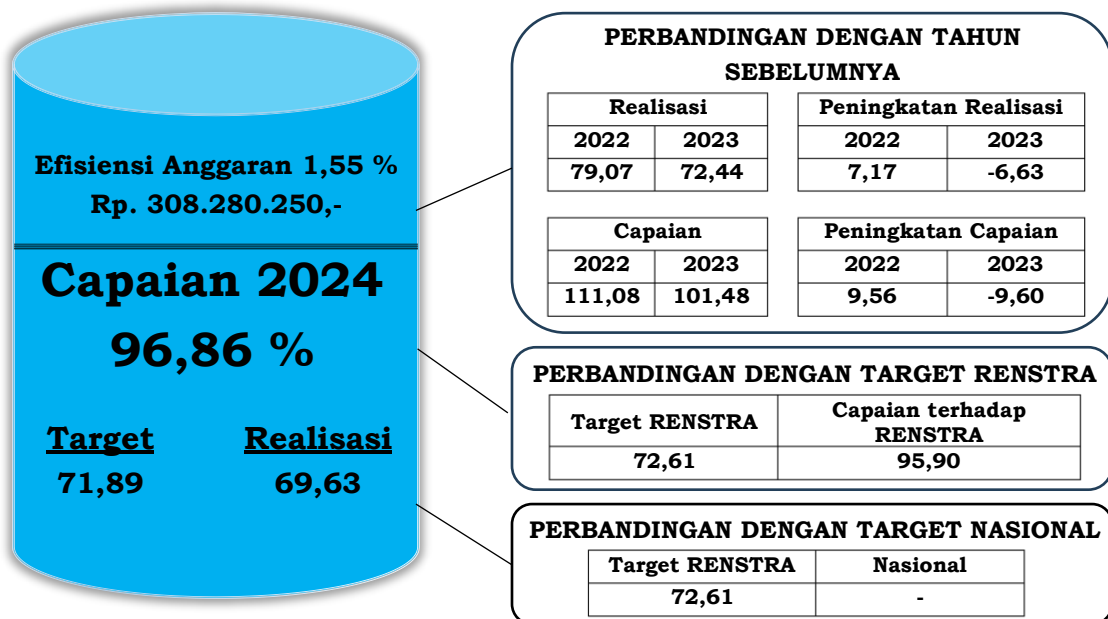
1. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga; dan
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).

Adapun efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 0,67% atau setara dengan Rp. 18.906.398,- Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.811.620.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.792.713.602,-.

6. **Meningkatnya Kepesertaan KB**

Rasio Akseptor KB

Rasio Akseptor KB pada tahun 2024 capaian kinerjanya adalah sebesar 96,86%. Apabila dibandingkan realisasi tahun 2023 yaitu 72,44% terdapat Penurunan 2,81% pada tahun 2024 menjadi 69,63%. Angka ini tidak mencapai target pada tahun 2024 yaitu 71,89%, Capaian kinerja dari indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari indikator kinerja yang diukur, capaian kinerjanya tidak mencapai target yang direncanakan.

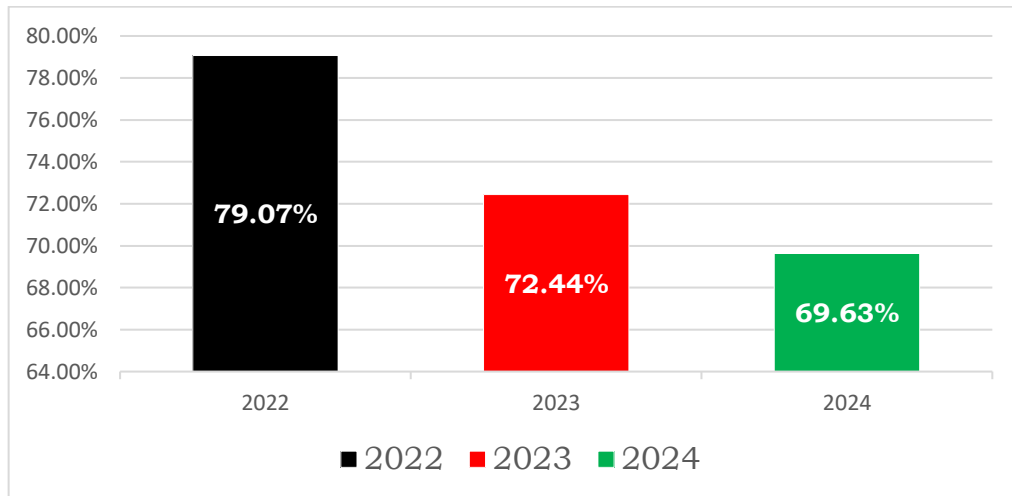


Pada Aspek Realisasi Rasio Akseptor KB mengalami Penurunan 2,81% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 72,44% menurun pada tahun 2024 sebesar 69,63%. Serta pada aspek kinerja, capaian pada tahun 2024 ini mengalami Penurunan 4,62% dari pencapaian target tahun sebelumnya yaitu capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 101,48% menjadi 96,86% pada tahun 2024.

Dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian kinerja Tahun 2024 terealisasi sebesar 69,63% dari target Renstra sebesar 72,61%. Capaian tahun 2024 tidak bisa mencapai target. sehingga capaian realisasi Rasio Akseptor KB tidak bisa mencapai capaian Renstra yang telah ditetapkan. Berdasarkan tren data, capaian realisasi Rasio Akseptor KB tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami Penurunan di tahun 2022 realisasi sebesar 79,07%, tahun 2023 mencapai 72,44% dan pada tahun 2024 sebesar 69,63%. Hal ini dikarenakan Tidak semua tempat pelayanan KB melaporkan melalui Aplikasi Sistem

Informasi Keluarga (SIGA) terutama yang menggunakan alat dan obat kontrasepsi mandiri.

Tren Peningkatan realisasi Rasio Akseptor KB



Maka, formulasi/perhitungan capaian kinerja dari indikator kinerja dimaksud adalah sebagai berikut :

$$\left(\frac{\text{jumlah Peserta Aktif KB modern}}{\text{jumlah pasangan usia subur}} \right) \times 100$$

$$\left(\frac{214.396 \text{ orang}}{309.552 \text{ orang}} \right) \times 100 = 69,63\%$$

Rasio Akseptor KB bertujuan untuk Meningkatkan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi. Faktor keberhasilan tercapainya target Rasio Akseptor KB melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota;
3. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal;
4. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);
5. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota;
6. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan

7. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

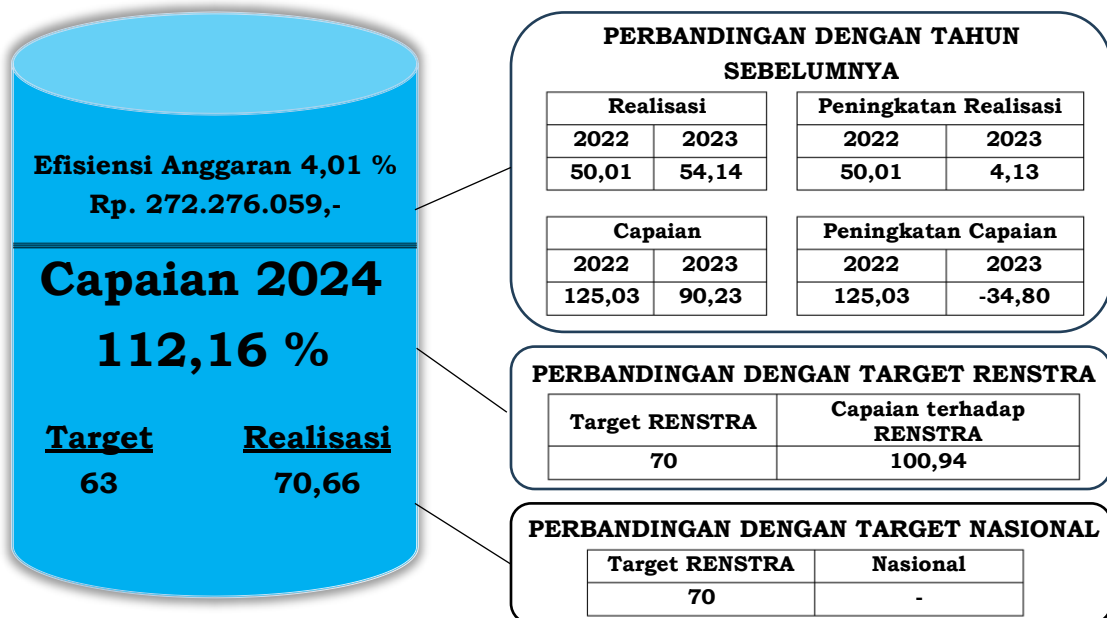
Program yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu:

1. Program Pengendalian Penduduk;
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); dan
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Adapun efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 1,55% atau setara dengan Rp. 308.280.250,- Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 19.913.530.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.605.249.750,-.

7. **Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah** **Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**

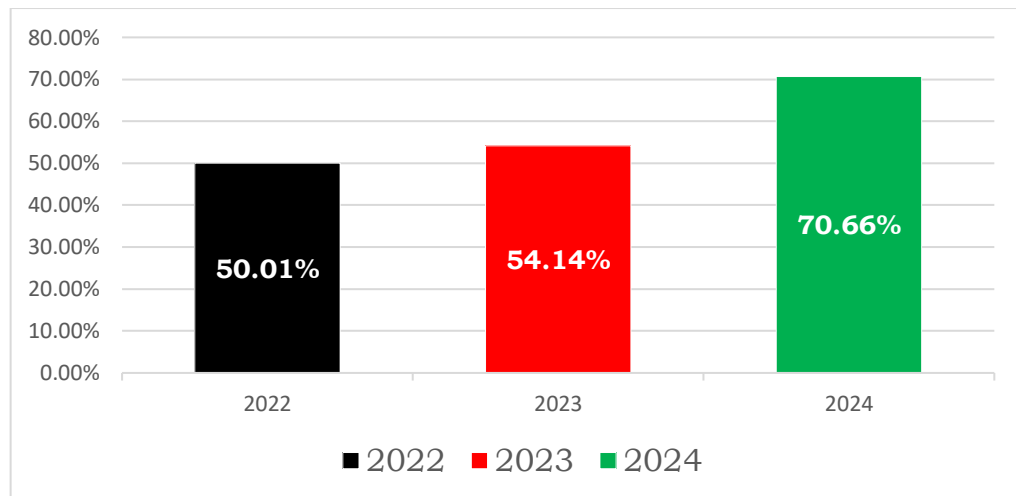
Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 terealisasi dengan nilai 70,66 poin dengan bobot nilai (BB) Baik dari target nilai 63 poin. Upaya perbaikan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan dengan mengikuti rekomendasi penyempurnaan manajemen kinerja yang disampaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.



Pada Aspek Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan signifikan sebesar 16,52 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 54,14 Poin meningkat pada tahun 2024 sebesar 70,66 Poin. Sedangkan pada aspek kinerja, capaian pada tahun 2024 ini mengalami peningkatan 21,93% dari pencapaian target tahun sebelumnya yaitu capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 90,23%% menjadi 112,16% pada tahun 2024.

Dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian kinerja Tahun 2024 terealisasi sebesar 70,66 Poin dari target Renstra sebesar 70 Poin. Capaian tahun 2024 telah melampaui target sebesar 30,94 Poin. sehingga capaian realisasi Nilai Reformasi Birokrasi telah melampaui capaian Renstra yang telah ditetapkan. Berdasarkan tren data, capaian realisasi Nilai Reformasi Birokrasi tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami Peningkatan di tahun 2022 realisasi sebesar 50,01 Poin, tahun 2023 mencapai 54,14 Poin dan pada tahun 2024 sebesar 70,66 Poin.

Tren Peningkatan realisasi Nilai Reformasi Birokrasi



Faktor keberhasilan tercapainya target Nilai Reformasi Birokrasi melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 4,01% atau setara dengan Rp. 272.276.059,- Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.788.947.977,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.516.671.918,-

AKUNTABILITAS KEUANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisiensi	
I	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial	121,48	1.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	6.630.628.123	6.536.195.123	94.433.000	98,58	1,42
				1.	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	6.630.628.123	6.536.195.123	94.433.000	98,58	1,42
				1.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	202.500.000	200.812.500	1.687.500	99,17	0,83
				2.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.428.128.123	5.341.037.623	87.090.500	98,40	1,60
				3.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.000.000.000	994.345.000	5.655.000	99,43	0,57
II	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	2.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.849.000.000	2.789.513.750	59.486.250	97,91	2,09
				2.	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	725.000.000	691.943.850	33.056.150	95,44	4,56
				4.	Penyediaan Makanan	725.000.000	691.943.850	33.056.150	95,44	4,56
				3.	<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>	2.124.000.000	2.097.569.900	26.430.100	98,76	1,24
				5.	Koordinasi, Sosialisasi Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	1.500.000.000	1.473.569.900	26.430.100	98,24	1,76

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisiensi
		daerah Kabupaten/ Kota			6.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	624.000.000	624.000.000	-	100,00	0,00
III	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100	3.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.584.100.000	2.540.972.700	43.127.300	98,33	1,67	
				4.	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	2.584.100.000	2.540.972.700	43.127.300	98,33	1,67	
				7.	Penyediaan Permakanan	1.750.000.000	1.720.610.400	29.389.600	98,32	1,68	
				8.	Penyediaan Alat Bantu	834.100.000	820.362.300	13.737.700	98,35	1,65	
IV	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	100	4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	718.000.000	707.695.200	10.304.800	98,56	1,44	
				5.	<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota</i>	718.000.000	707.695.200	10.304.800	98,56	1,44	
				9.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial	250.000.000	239.695.200	10.304.800	95,88	4,12	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisiensi
V	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	95,65	5.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	803.000.000	799.990.000	3.010.000	99,63	0,37
					6. <i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	153.000.000	152.710.000	290.000	99,81	0,19
					11. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	153.000.000	152.710.000	290.000	99,81	0,19
					7. <i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	100.000.000	97.280.000	2.720.000	97,28	2,72
					12. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100.000.000	97.280.000	2.720.000	97,28	2,72
					8. <i>Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan</i>	550.000.000	550.000.000	-	100,00	0,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisiensi
					<i>Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>					
				13.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	550.000.000	550.000.000	-	100,00	0,00
				6.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	180.000.000	175.382.331	4.617.669	97,43	2,57
				9.	<i>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	25.850.000	24.305.851	1.544.149	94,03	5,97
				14.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25.850.000	24.305.851	1.544.149	94,03	5,97
				10.	<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	154.150.000	151.076.480	3.073.520	98,01	1,99
				15.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban	154.150.000	151.076.480	3.073.520	98,01	1,99

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisiensi
					Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					
				7.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	875.000.000	871.030.000	3.970.000	99,55	0,45
				11.	<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	75.000.000	71.405.000	3.595.000	95,21	4,79
				16.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000	71.405.000	3.595.000	95,21	4,79
				12.	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	200.000.000	199.625.000	375.000	99,81	0,19
				17.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	199.625.000	375.000	99,81	0,19
				13.	<i>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah</i>	600.000.000	600.000.000	-	100,00	0,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisiensi
					<i>Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>					
				18.	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000	600.000.000	-	100,00	0,00
				8.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	953.620.000	946.311.271	7.308.729	99,23	0,77
				14.	<i>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	275.000.000	270.358.022	4.641.978	98,31	1,69
				19.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	195.359.593	4.640.407	97,68	2,32
				20.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak	75.000.000	74.998.429	1.571	100,00	0,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisiensi
						Kewenangan Kabupaten/Kota					
				15.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		678.620.000	675.953.249	2.666.751	99,61	0,39
				21.	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		300.000.000	300.000.000	-	100,00	0,00
				22.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		378.620.000	375.953.249	2.666.751	99,30	0,70
VI	Meningkatnya Kepesertaan KB	Rasio Akseptor KB	96,86	9.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		487.000.000	483.700.000	3.300.000	99,32	0,68
				16.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		100.000.000	99.250.000	750.000	99,25	0,75

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisiensi	
					23.	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000	99.250.000	750.000	99,25	0,75
					17.	<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	387.000.000	384.450.000	2.550.000	99,34	0,66
					24.	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	387.000.000	384.450.000	2.550.000	99,34	0,66
				10.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		9.660.530.000	9.424.162.250	236.367.750	97,55	2,45
					18.	<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	2.110.100.000	1.977.405.000	132.695.000	93,71	6,29
					25.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	595.100.000	582.110.000	12.990.000	97,82	2,18
					26.	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi	665.000.000	619.125.000	45.875.000	93,10	6,90

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisiensi
					Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					
				27.	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.000.000	99.845.000	155.000	99,85	0,16
				28.	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	750.000.000	676.325.000	73.675.000	90,18	9,82
				19.	<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>	1.561.000.000	1.560.170.000	830.000	99,95	0,05
				29.	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.561.000.000	1.560.170.000	830.000	99,95	0,05
				20.	<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/ Kota</i>	1.822.180.000	1.739.762.250	82.417.750	95,48	4,52
				30.	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang	37.800.000	21.732.000	16.068.000	57,49	42,51

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisiensi
				22. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	9.766.000.000	9.697.387.500	68.612.500	99,30	0,70
				34. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000	234.900.000	65.100.000	78,30	21,70
				35. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	400.000.000	396487500	3.512.500	99,12	0,88
				36. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan	9.066.000.000	9066000000	-	100,00	0,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisiensi
						Keluarga Akseptor (UPPKA)					
VII	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	112,16	12.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		6.788.947.977	6.516.671.918	272.276.059	95,99	4,01
					23.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	95.000.000	93.955.000	1.045.000	98,90	1,10
					37.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	49.125.000	875.000	98,25	1,75
					38.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	24.830.000	170.000	99,32	0,68
					39.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	-	100,00	0,00
					24.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	5.306.077.977	5.074.533.231	231.544.746	95,64	4,36
					40.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.306.077.977	5.074.533.231	231.544.746	95,64	4,36

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisiensi
				25. <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	413.115.450	401.406.354	11.709.096	97,17	2,83
				41. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.070.000	85.307.150	2.762.850	96,86	3,14
				42. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	77.350.000	70.158.070	7.191.930	90,70	9,30
				43. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	24.785.000	215.000	99,14	0,86
				44. Penyediaan Bahan/Material	77.690.000	76.934.500	755.500	99,03	0,97
				45. Fasilitasi Kunjungan Tamu	46.620.000	46.620.000	-	100,00	0,00
				46. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.385.450	97.601.634	783.816	99,20	0,80
				26. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	628.260.000	602.996.083	25.263.917	95,98	4,02
				47. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	304.070.000	278.946.083	25.123.917	91,74	8,26
				48. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.190.000	324.050.000	140.000	99,96	0,04
				27. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	346.494.550	343.781.250	2.713.300	99,22	0,78

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisiensi	
					49.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	208.114.550	205.435.500	2.679.050	98,71	1,29
					50.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.380.000	58.350.000	30.000	99,95	0,05
					51	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000	79.995.750	4.250	99,99	0,01
JUMLAH						42.295.826.100	41.489.012.043	806.814.057	98,09	1,91	

ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 7 sasaran, terdapat beberapa sasaran yang capaian kinerjanya sudah melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebesar 1,91% atau senilai Rp. 806.814.057,- yang rinciannya sebagai berikut :

1. Kinerja Sasaran “Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin” tercapai melalui indikator “Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial” sebesar 121,48% dan efisiensi anggaran sebesar 1,42%;
2. Kinerja Sasaran “Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah” tercapai melalui indikator “Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota” sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 2,09%;
3. Kinerja Sasaran “Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti” tercapai melalui indikator “Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar” sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 1,67%;
4. Kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS” tercapai melalui indikator “Persentase PPKS yang tertangani” sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 1,44%;
5. Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak” tercapai melalui indikator “Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)” sebesar 95,65% dan efisiensi anggaran sebesar 0,67%;
6. Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kepesertaan KB” tercapai melalui indikator “Rasio Akseptor KB” sebesar 96,86% dan efisiensi anggaran sebesar 1,55%;
7. Kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah” tercapai melalui indikator “Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah” sebesar 112,16% dan efisiensi anggaran sebesar 4,01%.

Besaran anggaran per program dan realisasi anggarannya sesuai dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Penunjang;

No	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.788.947.977	6.516.671.918	95,99

2. Urusan Sosial;

No	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	718.000.000	707.695.200	98,56
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.584.100.000	2.540.972.700	98,33
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	6.630.628.123	6.536.195.123	98,58
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.849.000.000	2.789.513.750	97,91

3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

No	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	803.000.000	799.990.000	99,63
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	180.000.000	175.382.331	97,43
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	875.000.000	871.030.000	99,55
4	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	953.620.000	946.311.271	99,23

4. Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

No	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	487.000.000	483.700.000	99,32
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	9.660.530.000	9.424.162.250	97,55
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	9.766.000.000	9.697.387.500	99,30

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jumlah urusan pemerintahan yang diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) urusan, yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk keluarga berencana, dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Dari 7 (tujuh) sasaran strategis yang telah ditetapkan, terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran yang terdiri dari 4 (empat) indikator sasaran urusan bidang sosial, 1 (satu) indikator sasaran urusan bidang pengendalian penduduk keluarga berencana, 1 (satu) indikator sasaran urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta 1 (satu) indikator sasaran urusan penunjang;
3. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa dari 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya, sebagian telah dapat menyamai capaian kinerja tahun sebelumnya dengan persentase sebesar 42,86%, yang melampaui capaian tahun sebelumnya sebesar 28,57%, yang mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 28,57%;
4. Jumlah program yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran sebanyak 12 (dua belas) program dengan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan dan 51 Sub Kegiatan;

4.2. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan urusan bidang sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya layanan perlindungan dan jaminan sosial;
2. Belum optimalnya layanan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
3. Belum optimalnya upaya peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;

4. Belum optimalnya penyelenggaraan program Bangga Kencana (*Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana*).

Strategi pemecahan masalah yang diupayakan oleh Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

- 1) Mengoptimalkan layanan perlindungan dan jaminan sosial;
- 2) Mengoptimalkan layanan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
- 3) Mengupayakan peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
- 4) Mengoptimalkan penyelenggaraan program Bangga Kencana (*Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana*).

Demikian Laporan Kinerja Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan selama periode tahun pelaporan.

Singaparna, Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL, PPKB P3A
KABUPATEN TASIKMALAYA

OPAN SOPIAN, S.Pd, M.Si, M.Pd.

Pembina Tk.I - IV/b

NIP. 196710281991031008





**PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL PPKB PPPA KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **OPAN SOPIAN, S.Pd, M.Si, M.Pd.**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADE SUGIANTO**
Jabatan : Bupati Tasikmalaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

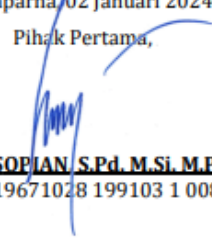
Pihak kedua melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaparna, 02 Januari 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


ADE SUGIANTO


OPAN SOPIAN, S.Pd, M.Si, M.Pd.
NIP. 19671028 199103 1 008

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL PPKB PPPA KABUPATEN TASIKMALAYA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial	67,17 %
2.	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	100 %
3.	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100 %
4.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	4,24 %
5.	Meningkatnya kualitas pemberdayaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,32 Poin
6.	Meningkatnya kepesertaan KB	Rasio akseptor KB	71,89 %
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	63 Poin


No	Program	Aggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.357.047.977	
2	Program Pemberdayaan Sosial	718.000.000	
3	Program Rehabilitasi Sosial	2.593.000.000	
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.606.500.000	
5	Program Penanganan Bencana	1.849.000.000	
6	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	703.000.000	
7	Program Perlindungan Perempuan	150.000.000	
8	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	875.000.000	
9	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	953.620.000	
10	Program Pengendalian Penduduk	487.000.000	
11	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	8.932.530.000	
12	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	9.766.000.000	
	Jumlah	37.990.697.977	

Pihak Kedua,


ADE SUGIANTO

Singaparna, 02 Januari 2024

Pihak Pertama,


OPAN SOPHAN, S.Pd, M.Si, M.Pd.
NIP. 19671028 199103 1 008



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS SOSIAL PPKB PPPA KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **OPAN SOPIAN, S.Pd, M.Si, M.Pd.**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADE SUGIANTO**
Jabatan : Bupati Tasikmalaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

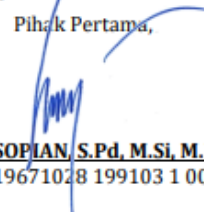
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaparna, 02 Oktober 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


ADE SUGIANTO


OPAN SOPIAN, S.Pd, M.Si, M.Pd.
NIP. 19671028 199103 1 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL PPKB PPPA KABUPATEN TASIKMALAYA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial	67,17 %
2.	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	100 %
3.	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100 %
4.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	4,24 %
5.	Meningkatnya kualitas pemberdayaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,32 Poin
6.	Meningkatnya kepesertaan KB	Rasio akseptor KB	71,89 %
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	63 Poin

No	Program	Aggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.788.947.977	
2	Program Pemberdayaan Sosial	718.000.000	
3	Program Rehabilitasi Sosial	2.584.100.000	
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	6.630.628.123	
5	Program Penanganan Bencana	2.849.000.000	
6	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	803.000.000	
7	Program Perlindungan Perempuan	180.000.000	
8	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	875.000.000	
9	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	953.620.000	
10	Program Pengendalian Penduduk	487.000.000	

11	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	9.660.530.000	
12	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	9.766.000.000	
	Jumlah	42.295.826.100	

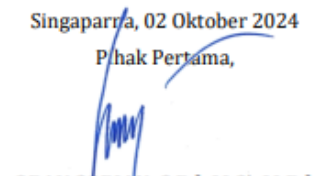
Pihak Kedua,



ADE SUGIANTO

Singapura, 02 Oktober 2024

Pihak Pertama,



OPAN SOPIAN, S.Pd, M.Si, M.Pd.
NIP. 19671028 199103 1 008

**LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN TIM PENYUSUN LKIP TAHUN
2024 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN TASIKMALAYA**

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	OPAN SOPIAN, S.Pd, M.Si, M.Pd.	Penanggung jawab	
2.	dr. Hj. ELI HENDALIA, M.H.Kes.	Ketua	
3.	EUIS AISAH, S.IP., M.Si	Sekretaris	
4.	ITA AGUSTIA, S.IP	Anggota	
5.	MOHAMAD RIFAI, S.Sos	Anggota	
6.	NOORDIN HENDRAWAN, SE	Anggota	
7.	TENI MULYATENI, S.IP.	Anggota	